

Editor: Rianto, Muhammad Ikmal Setiadi.



# **STRATEGI NAVAL DIPLOMACY INDO-PACIFIC**

**Dalam Menghadapi Nuclear Submarines Australia**

Agus Adriyanto, Edy Sulistiyadi,  
Lukman Yudho Prakoso, Rudy Sutanto,  
Aries Sudiarso.





# **STRATEGI NAVAL DIPLOMACY INDO-PACIFIC**

**Dalam Menghadapi Nuclear Submarines Australia**

Agus Adriyanto, Edy Sulistiyadi,  
Lukman Yudho Prakoso, Rudy Sutanto,  
Aries Sudiarso.



**STRATEGI NAVAL *DIPLOMACY INDO-PACIFIC* DALAM MENGHADAPI  
*NUCLEAR SUBMARINES AUSTRALIA***

Penulis:

**Agus Adriyanto, Edy Sulistiyadi,  
Lukman Yudho Prakoso, Rudy Sutanto,  
Aries Sudiarso.**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Rianto**

**Muhammad Ikmal Setiadi**

ISBN:

**978-623-459-621-2**

Cetakan Pertama:

**Agustus, 2023**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul *Strategi Naval Diplomacy Indo-Pacific Dalam Menghadapi Nuclear Submarines Australia*. Penulisan buku ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu. Akhir kata, Semoga maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari Penulis melalui buku ini dapat terwujud. Penulis juga berharap buku ini dapat meningkatkan semangat dalam mewujudkan Pertahanan Indonesia yang lebih tangguh dalam mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Yang Mandiri Dalam Produksi Alutsista Nasional. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis

## PRAKATA

Sungguh sebuah kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam bagi editor karena dapat berkontribusi menyelesaikan buku yang berjudul *Strategi Naval Diplomacy Indo-Pacific Dalam Menghadapi Nuclear Submarines Australia*.

Pertengahan September lalu atau tepatnya tanggal 15 September tahun 2021 menjadi momen yang mengejutkan bagi negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Bagaimana tidak, salah satu negara yang berada di kawasan tersebut yakni Australia. Secara mendadak mengumumkan pakta keamanan trilateral baru di kawasan, yang dilakukan dengan menggandeng mitra tradisional mereka yakni, Inggris dan Amerika Serikat (AS) dengan nama AUKUS (Prime Minister of Australia, 2021). Pakta pertahanan yang bertujuan untuk menciptakan keamanan kolektif ini, justru menuai respon penolakan yang kuat dari beberapa negara lainnya di kawasan, khususnya Tiongkok yang memaknai pakta pertahanan tersebut sebagai ancaman yang sangat tak bertanggung jawab (CNN INDONESIA, 2021) dan menjadi tantangan terbuka terhadap (Wangke, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, menjadi suatu hal yang menarik untuk menganalisis arah kebijakan Pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan pakta pertahanan trilateral AUKUS serta hubungannya dengan konflik RRT-ASEAN di LTS dan politik bebas aktif yang dianut

oleh Indonesia. Namun sebelum menganalisis perihal sikap yang dapat ditempuh oleh Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai posisi faktual Indonesia saat ini terhadap AUKUS dan RRT. Beberapa hari sebelum pakta pertahanan trilateral AUKUS disepakati, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan *Australia Minister of Defence* (Peter Dutton) dan *Australia Minister of Foreign Affairs* (Marise Payne) pada 9 September 2021 di Jakarta.

Editor Berharap, buku ini tidak hanya sekedar tulisan semata, melainkan dapat dijadikan referensi sebagai pedoman pengambilan keputusan kebijakan dalam upaya memperkuat pertahanan Nirmiliter.

Jakarta, Agustus 2023

Editor

# *DAFTAR ISI*

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>LATAR BELAKANG INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Pertahanan Negara.....	11
C. Pertahanan Laut.....	14
D. Diplomasi Pertahanan .....	18
E. Geopolitik.....	20
F. Regionalisme.....	23
G. Implementasi Kebijakan .....	24
H. Aukus, Peran Sentral Asean dan Keamanan Regional.....	28
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>58</b>

# LATAR BELAKANG INDUSTRI

## PERTAHANAN NASIONAL

---

### A. PENDAHULUAN

Pertengahan September lalu atau tepatnya tanggal 15 September tahun 2021 menjadi momen yang mengejutkan bagi negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Bagaimana tidak, salah satu negara yang berada di kawasan tersebut yakni Australia. Secara mendadak mengumumkan pakta keamanan trilateral baru di kawasan, yang dilakukan dengan menggandeng mitra tradisional mereka yakni, Inggris dan Amerika Serikat (AS) dengan nama AUKUS (Prime Minister of Australia, 2021). Pakta pertahanan yang bertujuan untuk menciptakan keamanan kolektif ini, justru menuai respon penolakan yang kuat dari beberapa negara lainnya di kawasan, khususnya Tiongkok yang memaknai pakta pertahanan tersebut sebagai ancaman yang sangat tak bertanggung jawab (CNN INDONESIA, 2021) dan



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. In CV. Alfabeta. CV. Alfabeta.

Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Grasindo.

Yusgiantoro, P. (2014). *Defense Economics*. Main Library Gramedia. Jakarta.

### Artikel dan Tesis

Armandos, D., Yusnaldi, Y., & Purwanto, P. (2017). Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam Mendukung Keamanan Maritim di Pulau Nipa. *Keamanan Maritim*, 3(2).

- Arsita, S. A., Saputro, G. E., & Susanto, S. (2022). Implementasi Kebijakan Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Offset (IDKLO) dalam Pengadaan Meriam 155 MM Caesar untuk Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 8(1).
- Batubara, F. D., Gultom, R. A. G., & Bura, R. O. (2020). Desain Konseptual Integrasi Sistem Drone/Uav Dan Sensor Radar Pasif Sebagai Fungsi Situasional Blank Spot Filler Sistem Radar Pertahanan Udara (Studi: Satuan Radar 211 Tanjung Kait). *Teknologi Penginderaan*, 2(1).
- Berman, P. (1980). *Toward an Implementation Paradigm of Educational Change*.
- DeLeon, P., & DeLeon, L. (2002). What ever happened to policy implementation? An alternative approach. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 12(4), 467–492.
- Easton, D. (1953). *The Political System*. New York: AlfredA. Knopf.
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

- Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. *Political Science Quarterly*, 94(4), 601–616.
- Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1989). Policy makers, policy choices, and policy outcomes: The political economy of reform in developing countries. *Policy Sciences*, 22(3), 213–248.
- Gunawan, D., Lestari, A. A., & others. (2021). Analisis lokasi Penempatan Radar GCI dan Gap Filler dalam Mendukung Pertahanan Negara Berbasis Sistem Informasi Geografis di Wilayah KOSEKHANUDNAS I. *Teknologi Penginderaan*, 3(1).
- Guntur, H. J. P. Y. S., & Saputro, E. (n.d.). *Integrated Structure in the Defense Industry Sector*.
- Heinz, E., & Prewitt, K. (1973). Labyrinths of Democracy. *Indianapolis: Bobbs-Merrill*, 464–488.
- Hjern, B. (1982). Implementation research—the link gone missing. *Journal of Public Policy*, 2(3), 301–308.
- Hjern, B., & Porter, D. O. (1983). Implementation structures: A new unit of administrative analysis. In *Realizing social science knowledge* (pp. 265–277). Springer.

- Hogwood, B., & Gunn, L. (1993). Why “perfect implementation” is unattainable. *The Policy Process. A Reader*, 2, 217–225.
- Hogwood, B. W., Gunn, L. A., & Archibald, S. (1984). *Policy analysis for the real world* (Vol. 69). Oxford University Press Oxford.
- Keliat, M. (2010). Ekonomi Pertahanan Indonesia. *Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*, 9(1).
- Kolonel, P., & Jaetul, S. (1995). *Markas besar angkatan udara staf ahli. 1945*, 1–22.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. Sage.
- Kurniawan, S. (2012). *Saatnya BUMN Tampil Sebagai Korporasi*. Marketeers.
- Lasswell, H. D. (2017). *Power and personality*. Routledge.
- Lipsky, M. (1971). Street-level bureaucracy and the analysis of urban reform. *Urban Affairs Quarterly*, 6(4), 391–409.
- Pramadi, M. M. T. N. I. P. N., Lestari, A. A., Winarko, O. D., Yulian, D., Hidayat, R., Nugroho, H. A., Prasaja, F., Patriadi, D. D., Putri, I. H., & Titasari, M. (1998). Radar dan Stealth. *Delft University of Technology*, 2013.



- Pujatmoko, S., Mualim, M., Sasongko, N. A., & others. (2022). PT PAL Empowerment Strategy as a Lead Integrator at ALPALHANKAM KCR 60 to Support State Defense at Sea. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 972(1), 12059.
- Rianto, M. S. (2017). Peningkatan Peran PT. Daya Radar Utama dalam Pembangunan KRI Jenis Angkut Tank Guna Mendukung Terwujudnya Kemandirian Industri Pertahanan. *Strategi Perang Semesta*, 3(3).
- Richards, M. A., Scheer, J., Holm, W. A., & Melvin, W. L. (2010). *Principles of modern radar* (Vol. 1). Citeseer.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983). The prospects for effective implementation of regulatory policy. In *Can Regulation Work?: The Implementation of the 1972 California Coastal Initiative* (pp. 1–26). Springer.
- Santiko, U., & Agustien, M. D. (2022). Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis dalam Memenuhi Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019. *Moestopo Journal of International Relations*, 2(1), 77–90.

- Saputra, O. I., Darmawan, W. B., & Dermawan, W. (2022). Kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Udara. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(1), 72–80.
- Savitri, R. N. R., & Prabandari, A. P. (2020). TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 236–245.
- Setiani, B. (2018). Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 489–510.
- Sjamsoedin, S. (2013). *Era Kebangkitan Industri Pertahanan*. Kompas.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Widodo, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan Udara. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 9(2).

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center for Academic Publishing Service.

Winter, S. (1999). *Policy Currents*.

### **Undang - Undang**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

### **Peraturan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan



# STRATEGI NAVAL DIPLOMACY INDO-PACIFIC

Dalam Menghadapi Nuclear Submarines Australia

Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan jumlah pulau yang wilayahnya didominasi oleh perairan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan laut adalah sumber daya pertahanan utama yang harus diberdayakan secara optimal. Menurut sudut pandang lain, luasnya wilayah perairan Indonesia harus juga dipandang sebagai ruang yang memunculkan banyak potensi ancaman, yang apabila tidak dipertahankan dengan ketat akan dapat menjadi pangkal permasalahan yang membahayakan kedaulatan negara.

Pertahanan merupakan bagian tidak terpisahkan dari konsep keamanan nasional. Pertahanan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan dengan memberdayakan kekuatan militer untuk menciptakan keamanan. Berdasarkan keberadaan pertahanan yang kuat, maka tidak hanya akan terbentuk keamanan nasional, namun juga kesejahteraan dan perkembangan kehidupan secara berkelanjutan.

Pertahanan negara mencakup pertahanan yang sifatnya militer namun juga non militer. Sistem pertahanan non militer disebut juga dengan sistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata), yang mengkedepankan peran lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan yang didukung oleh komponen kekuatan bangsa lainnya sebagai unsur utama. Hal ini didasarkan pada karakteristik dari ancaman nonmiliter yang dihadapi, yang membutuhkan karakteristik kekuatan yang senada untuk dapat secara efektif mengupayakan pertahanan negara.